

**EKSISTENSI WANITA TUNA SUSILA (WTS) DI
KOTA BANDUNG DAN DAMPAKNYA TERHADAP
TERJADINYA KRIMINALITAS DIHUBUNGKAN
DENGAN PERATURAN DAERAH (PERDA) KOTA
BANDUNG NOMOR 9 TAHUN 2019 TENTANG
KETERTIBAN UMUM, KETENTRAMAN DAN
PERLINDUNGAN MASYATAKAT
(TIBUMTRANLINMAS)**

Disusun oleh : Ilyasa Maulana

41151010150114

Program kekhususan : Hukum Pidana

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mendapatkan
Gelar Sarjana Hukum



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2020**

**THE EXISTENCE OF DEAF WOMEN (WTS) IN
BANDUNG AND ITS IMPACT ON CRIMINALITY IS
LINKED TO THE LOCAL REGULATION (PERDA)
OF BANDUNG CITY NUMBER 9 OF 2019 ON PUBLIC
ORDER, PEACE AND PROTECTION OF THE
COMMUNITY (TIBUMTRANLINMAS)**

BY: Ilyasa Maulana

41151010150114

Speciality Program : Criminal Law

FINAL PROJECT

Submitted To Meet One of the Requirements to Obtain
Bachelor's Degree in Law



**FACULTY OF LAW
UNIVERSITY OF LANGLANGBUANA
Bandung
2020**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ILYASA MAULANA

NPM : 41151010150114

Bentuk Penulisan : SKRIPSI

Judul :

EKSISTENSI WANITA TUNA SUSILA (WTS) DI KOTA BANDUNG DAN DAMPAKNYA TERHADAP TERJADINYA KRIMINALITAS DI HUBUNGKAN DENGAN PERATURAN DAERAH (PERDA) KOTA BANDUNG NOMOR 9 TAHUN 2019 TENTANG KETERTIBAN UMUM, KETENTRAMAN DAN PERLINDUNGAN MASYATAKAT (TIBUMTRANLINMAS)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tugas akhir ini adalah hasil karya cipta saya sendiri dan bukan hasil plagiat. Apabila ternyata dikemudian hari terbukti benar bahwa tugas akhir saya ini adalah hasil plagiat, maka dengan ini saya menyatakan kesanggupan bahwa saya bersedia untuk menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Demikian pernyataan keaslian tugas akhir ini saya buat dengan sebenarnya, dimana penulis dalam keadaan sadar, sehat dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Yang memberi pernyataan

ILYASA MAULANA
41151010150114

ABSTRAK

Lapangan kerja di Indonesia yang tersedia belum mampu menyerap tenaga kerja yang ada. Wanita tuna susila melakukan Praktik prostitusi terang-terangan maupun terselubung di Kota Bandung adalah perilaku yang diluar norma-norma hukum, norma Agama, norma adat, dan norma asusila, karena wanita tuna susila melakukan pekerjaan yang tidak semestinya. Dampak negatif dari keberadaan wanita tuna susila ini tentu berkembangnya angka kriminalitas. Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Peraturan Daerah Kota dan Kabupaten untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tenteram, tertib, dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. permasalahan ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis wanita tuna susila di Kota Bandung berdampak terjadinya kriminalitas dan untuk mengetahui upaya penerapan Peraturan Daerah Kota Bandung terhadap penertiban wanita tuna susila.

Metode pendekatan yang digunakan yuridis normatif yang bertujuan mencari dasar hukum positif serta spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yaitu menganalisis sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam hukum positif pidana Indonesia. Tahap penelitian menggunakan data berupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Analisis data menggunakan yuridis kualitatif yang menganalisis data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen dan buku-buku yang diteliti kemudian dapat ditarik kesimpulan.

Hasil penelitian skripsi ini dapat ditarik kesimpulan bahwa terjadinya angka kriminalitas atas keberadaan wanita tuna susila ini tidak hanya di jalanan atau tempat umum saja, melainkan di hotel-hotel daerah Kota Bandung. Ketentuan mengenai wanita tuna susila tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat. Penertiban terhadap wanita tuna susila dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat. Dinas Sosial Kota Bandung. Dinas Sosial Kota Bandung dalam menangani wanita tuna susila dengan melakukan rehabilitasi seperti mengembangkan kemampuan, dan membuat mereka memiliki kesiapan untuk menguasai hal-hal yang berhubungan dengan bidang pekerjaan yang diminatinya, diberikan keterampilan, sehingga menambah kesiapan mereka untuk terjun kembali ke masyarakat.

ABSTRACT

The available jobs in Indonesia have not been able to absorb the existing workforce. Deaf women practice overt and covert prostitution in Bandung is behavior that is outside the norms of law, religious norms, customary norms, and immoral norms, because deaf women do inappropriate things. The negative impact of the existence of deaf women is certainly growing crime rates. Pamong Praja Police Unit was formed to enforce the Local Regulations and Regulations of the Head of Daerah, to conduct public order and peace, and to organize the protection of the community. City and District Regulations to create a peaceful, orderly, and orderly regional condition so that the maintenance of the wheels of government can run smoothly and the community can conduct its activities safely. This problem aims to know and analyze the deaf women in Bandung impacting criminality and to know the efforts of applying the Bandung Regional Regulation to the regulation of deaf women.

The method of approach used normative juridical that aims to find a positive legal basis as well as the research specifications used is descriptive analysis i.e. analyzing in accordance with the prevailing regulations in Indonesian criminal positive law. The research phase uses data in the form of secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials. Data collection techniques are performed through literature studies to collect data related to the problems studied. Analysis of data using qualitative juridical that analyzes data obtained from legislation, documents and books examined can then be drawn conclusions.

The results of this thesis study can be concluded that the criminality of the existence of deaf women is not only in the streets or public places, but in hotels in Bandung. The provisions concerning deaf women are listed in Bandung Regional Regulation No. 9 of 2019 concerning Public Order, Peace and Protection of Society. The regulation of deaf women is carried out by the Pamong Praja Police Unit of Bandung in accordance with the Operational Standards of Procedure, namely The Minister of Home Affairs Regulation No. 54 of 2011 on Operational Standards of Pamong Praja Police Unit Procedure and Local Regulation of Bandung No. 9 of 2019 on Public Order, Peace and Protection of the Community. Bandung Social Service. Bandung Social Office in dealing with deaf women by doing rehabilitation such as developing skills, and making them have the ability to master things related to the field of work that they are interested in, given skills, thus increasing their readiness to dive back into society.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala karunia, rahmat serta ridho-Nya telah memberikan nikmat kesehatan pada penulis dan pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan bentuk penulisan Skripsi salah satu syarat guna mendapatkan gelar sarjana, dengan judul: EKSISTENSI WANITA TUNA SUSILA (WTS) DI KOTA BANDUNG DAN DAMPAKNYA TERHADAP TERJADINYA KRIMINALITAS DI HUBUNGAN DENGAN PERATURAN DAERAH (PERDA) KOTA BANDUNG NOMOR 9 TAHUN 2019 TENTANG KETERTIBAN UMUM, KETENTRAMAN DAN PERLINDUNGAN MASYATAKAT (TIBUMTRANLINMAS). Pada akhirnya dapat terselesaikan pada waktu yang tepat.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ibu Dewi Rohayati, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang dengan ketulusan dan kesabarannya telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan bimbingan, saran dan masukan selama proses pengerjaan tugas akhir hingga selesai, serta tak henti-hentinya memberikan semangat kepada penulis selama penyusunan Skripsi.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan berbagai kemudahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
2. Kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW sebagai panutan umat Islam di muka bumi ini.

3. Bapak DR. H. R.A.R. Harry Anwar, S.H., M.H. selaku Rektor Universitas Langlangbuana.
4. Ibu Dr. Hj. Hernawati, RAS S.H., M.Si, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
5. Ibu Eni Dasuki, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
6. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
7. Bapak Dani Durrahman, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
8. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H. selaku Ketua Prodi Bagian Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
9. Bapak Rachmat Suharno, S.H.,M.H selaku Sekertaris Prodi Bagian Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
10. Bapak H. Riyanto S. Akhmad, S.H., M.H. selaku Ketua Lab. Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
11. Bapak Riza Zulfikar, S.H., S.T., M.Kn. selaku Dosen Wali Penulis.
12. Bapak Asep Toni Hendriana selaku Kepala Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
13. Para Dosen dan Asisten Dosen serta Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
14. Terimakasih kepada Bapak Jeverson Erick, S.H dan Bapak Henry Kusuma, S.H. selaku PPNS/PPHD Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung yang

telah membantu penulis dalam mendapatkan berkas perkara, bekerja sama dalam wawancara dan bertukar pemikiran dalam membahas berkas perkara.

15. Terimakasih kepada Bapak Kasi Rehabilitasi Dinas Sosial Kota Bandung yang dapat bekerja sama mengenai informasi data wanita tuna susila yang direhabilitasi.
16. Terimakasih kepada rekan-rekan seperjuangan yaitu Niko Pratama, Afrizardi, Raka Adri Mainata, Ilham Yudhistira, Ragil Bagja, Kiki Rizky, Rey Ramadhan, dan Irfan Ferdiansyah Muis, S.H. yang telah saling memberikan semangat dan motivasi dengan seluruh kegiatan tugas akhir dan terimakasih kepada rekan-rekan kelas A3 dan kelas Program Kekhususan Pidana Angkatan 2015 yang telah sama-sama berjuang hingga tugas akhir.

Rasa terimakasih yang tidak terhingga penulis sampaikan kepada Papap tersayang H. Andi Odang Hidayat dan Mama tersayang Hj. Iis Maryati selaku Orang Tua penulis yang selalu mencintai, memberi dukungan dalam segala bentuk dan selalu mendoakan penulis dalam penulisan tugas akhir ini,. Sekali lagi terimakasih kepada orang tua bahwa jasa kalian tidak akan dan tidak akan pernah tergantikan oleh apapun.

Akhir kata, Penulis berharap semoga Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi pihak-pihak yang membutuhkan dan umumnya bagi ilmu pengetahuan di bidang Hukum Pidana.

Bandung, September 2020

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN.....	i
ABSTRAK.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Kerangka Pemikiran.....	7
F. Metode Penelitian.....	12
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM, SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PROSTITUSI DAN PERATURAN DAERAH	
A. Hukum, Masyarakat Hukum, Perbuatan Melawan Hukum.	
1. Pengertian Hukum.....	16
2. Masyarakat Budaya Hukum dan Perliku Menyimpang.....	18
3. Perbuatan Melawan Hukum.....	22
4. Efektivitas Hukum.....	25
5. Sosiologi Hukum.....	28
B. Penegak Hukum dan Penegakan Hukum.	

1. Penegak Hukum dan Penegakan Hukum.....	30
2. Satuan Polisi Pamong Praja.....	35
3. Dinas Sosial.....	39
C. Eksistensi Prostitusi dan Kriminalitas.	
1. Prostitusi Sebagai Penyakit Masyarakat.....	41
2. Lokalisasi Prostitusi.....	43
3. Faktor dan Penyebab Wanita Tuna Susila.....	45
4. Kriminalitas.....	47
D. Eksistensi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat.....	50

BAB III CONTOH KASUS WANITA TUNA SUSILA BERDAMPAK KRIMINALITAS

A. Kasus Nuraeni sebagai wanita tuna susila yang ditertibkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung.....	53
B. Kasus Herdi Suhendar sebagai juru parkir membunuh Ai Nurwulan sebagai wanita tuna susila.....	54

BAB IV ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG DALAM MENANGANI WANITA TUNA SUSILA BERDAMPAK KRIMINALITAS

A. Eksistensi wanita tuna susila di kota bandung yang berdampak terjadinya kriminalita.....	56
--	----

B. Penerapan Peraturan Daerah Kota Bandung terhadap penertiban wanita tuna susila.....	58
--	----

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	65

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP